PENERAPAN RETRIBUSI PADA KIOS PASAR WAGE TULUNGAGUNG

**IMPLEMENTATION OF RETRIBUTIONS AT TULUNGAGUNG WAGE MARKET
STORE**

Ardila (19.60302.100032)

ardiladila225@gmail.com

Esti wulandari (19.60302.100032)

estiwulandari029@gmail.com

Niken oktavia permadani (19.60302.100143)

oktavianiken17@gmail.com

ABSTRAK

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penyewa kios di Pasar Wage Kabupaten Tulungagung melakukan pembayaran retribusi pajak atau belum. Metode penelitian yang kami lakukan ini adalah dengan menggunakan metode wawancara dan survey secara langsung di lokasi tersebut. Penelitian dilakukan secara acak dengan mengambil dari beberapa sampel pedagang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa retribusi pasar di Pasar Wage bersumber dari penarikan sewa kios tersebut, penarikan retribusi di Pasar Wage Kabupaten Tulungagung tersebut menggunakan penarikan kios berupa karcis setiap hari dengan harga Rp.1000,- dan biaya iuran tahunan kurang lebih Rp 200.000,- . Pemasukan retribusi pasar nantinya akan di laporkan ke Pemerintah Daerah dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah. Fasilitas yang ada di Pasar Wage Kabupaten Tulungagung antara lain : toilet/WC, bank sampah, tempat parkir, gerobak sampah dan musholla.

Kata Kunci : *Retribusi pasar, Pasar Wage, Fasilitas*

ABSTRACT

Regional levies are local levies as payment for services or the granting of certain permits specifically provided or granted by local governments for personal or corporate interests. The purpose of this study was to determine whether the tenants of the kiosk at Pasar Wage, Tulungagung Regency paid the tax retribution or not. The research method that we do is by using interviews and surveys directly at the location. The study was conducted randomly by taking from several samples of traders. The results showed that the market retribution at Wage Market was sourced from the withdrawal of the kiosk rental, the withdrawal of the levy at the Wage Market, Tulungagung Regency using kiosk withdrawals in the form of tickets every day at a price of Rp. The market retribution income will be reported to the Regional Government and its management is fully submitted to the Regional Government. Existing facilities at Wage Market, Tulungagung Regency include: toilets/WC, waste banks, parking lots, garbage carts and prayer rooms.

Keywords: *Market retribution, Wage Market, Facilities*

PENDAHULUAN

Tulungagung merupakan Kabupaten yang dikenal sebagai kota marmer terbesar di Indonesia dan terletak 154 km barat daya kota Surabaya, Ibukota provinsi Jawa Timur . menurut sejarahnya wilayah Tulungagung merupakan wilayah kecil disekitar tempat yang saat ini adalah alon-alon kota. Nama di Tulungagung di dapat karena adanya sumber air yang besar pada waktu itu. Dalam bahasa kawi Tulung adalah mata air sedangkan agung adalah besar sehingga dijuluki sebagai kota Tulungagung.

Tulungagung terletak di ketinggian 85 km dari atas permukaan laut. Pada bagian barat merupakan daerah pegunungan, bagian dari pegunungan wilis-liman. Pada bagian tengah Tulungagung merupakan dataran rendah sedangkan dibagian selatan merupakan pegunungan, bagian dari pegunungan kidol. Dilihat dari keadaan alamnya Tulungagung memiliki beberapa potensi alam yang bisa dimanfaatkan sebagai obyek wisata. Selain dari industri marmer terbesar berpusat disini, Tulungagung juga memiliki beberapa sentra industri kecil dan menengah.

Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan bagi negara dalam menjalankan pemerintahan. Pemungutan pajak sudah lama ada, dari adanya upeti wajib kepada raja berupa hasil panen pada masa kerajaan, hingga sekarang dengan polanya masing-masing. Pada awalnya, pemungutan pajak berdasarkan aturan dari penguasa / raja, kini berubah melibatkan rakyat (pembayar pajak) melalui aturan antara penguasa (pemerintah) dengan rakyat melalui perwakilannya. (Prabowo, 2009)

Pengertian PAD (Pendapatan Asli Daerah) merupakan sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus bisa menjadi bagian keuangan daerah terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan yang diperlukan untuk memenuhi belanja rutin, bahkan diharapkan dapat diperoleh surplus (Tabungan Daerah) guna belanja pembangunan (Permana, n.d.).

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah komponen terbesar yang termasuk dalam PAD. Pajak adalah iuran wajib berupa barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma hukum, guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif

dalam mencapai kesejahteraan umum menurut Adrian dalam (Naleng et al., 2017a). Adapun yang dimaksud dengan Retribusi Daerah berdasarkan pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 adalah retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Di Kabupaten Tulungagung, Retribusi pasar merupakan salah satu sumber penerimaan retribusi daerah yang perlu mendapat perhatian, karena pendapatan penerimaan retribusi pasar akan mendukung peningkatan pendapatan retribusi yang pada giliran akan mendorong peningkatan pendapatan asli daerah. Pada Tahun 2016 Retribusi pasar menyumbang sebesar 3,38% untuk pendapatan asli daerah di Kabupaten Tulungagung. (Naleng et al., 2017b)

Keberhasilan pembangunan daerah sangat tergantung pada kemampuan pembayaran retribusi dan pajak daerah. Dengan adanya Retribusi dan Pajak Daerah dapat memenuhi kebutuhan daerah masing-masing dari segi keuangan maupun kesejahteraan masyarakat daerah Kabupaten Tulungagung. Keberhasilan pengelolaan penerimaan daerah tidak semata diukur dari jumlah penerimaan yang

dapat dicapai, tetapi sejauh mana pajak daerah dan retribusi daerah dapat berperan mengatur perekonomian masyarakat agar bertumbuh kembang dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah Kabupaten Tulungagung.

Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Potensi yang dapat digali oleh pemerintah daerah seperti Kabupaten Tulungagung adalah potensi pada sektor pajak. Pajak menjadi salah satu pendapatan terbesar bagi pendapatan Daerah. Semakin tinggi pendapatan yang diperoleh dari sektor pajak maka beban dan pemerintah pusat menjadi alternatif untuk dapat menggerakkan perekonomian daerah melalui pengeluaran yang bersifat efektif dan produktif. Menurut peraturan daerah Nomer 3 Tahun 2021 retribusi pasar adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar berupa pelataran yang dikelola oleh pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang. Menurut UU Nomor 66 Tahun 2021 jenis-jenis retribusi daerah dapat dikelompokkan menjadi 3 yaitu :

- Retribusi jasa umum
- Retribusi jasa usaha
- Retribusi perizinan jasa tertentu

Pengertian Tarif Pajak

Tarif pajak adalah persentase yang digunakan sebagai dasar dalam menghitung jumlah pajak yang harus disetor. Penurunan tarif Final UMKM dari 1% menjadi 0,5% menunjukkan bahwa tarif pajak merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan WP UMKM. Faktor aman perpajakan. Dewasa ini salah satu kelemahan wajib pajak UMKM adalah rendahnya pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan. Kelemahan - kelemahan inilah yang bisa memengaruhi wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Ada beberapa perubahan terkait peraturan pemerintah no 23 tahun 2018 tentang wajib pajak UMKM. Tentunya wajib pajak UMKM harus memiliki pemahaman yang baik terkait peraturan tersebut terutama tentang penurunan tarif final 0.5%. Perubahan peraturan tersebut akan memudahkan wajib pajak UMKM dalam melakukan perhitungan dan pembayaran pajak setiap bulannya.

Sanksi Pajak

Sanksi pajak adalah faktor lain yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Mardiasmo dalam (Hartati, 2019) menyebutkan sanksi perpajakan ialah suatu jaminan atas ketentuan perundang-

undangan perpajakan dapat dipatuhi atau dijalani. Sanksi yang dikenakan diharapkan bisa meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. (Cahyani & Noviani, 2019)

Retribusi pasar di pasar Wage Kabupaten Tulungagung masuk dalam kategori retribusi jasa umum yaitu retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi pasar masuk dalam retribusi jasa umum karena memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang di haruskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum. Di Pasar Wage Kabupaten Tulungagung masuk dalam retribusi jasa umum karena di Pasar Wage Kabupaten Tulungagung melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.

Di Pasar Wage Kabupaten Tulungagung masih terdapat permasalahan – permasalahan mengenai kondisi fisik maupun non fisik yang membutuhkan penanganan segera dari pemerintah yang tentunya dengan dukungan dari para pedagang yang ada di Pasar Wage Kabupaten Tulungagung. Berbagai fasilitas tersedia di Pasar Wage Kabupaten Tulungagung, diantaranya air bersih untuk

cuci tangan, kamar mandi, dan toilet, pengelolaan sampah mushola, dan tempat parkir. Ketersediaan fasilitas tersebut ternyata masih dinilai belum optimal oleh para pedagang pasar serta pembeli. Fasilitas yang diberikan juga kurang memadai seperti toilet umum dan tempat pedagang kurang menjaga kebersihan. Sehingga masyarakat Tulungagung kurang berminat untuk berbelanja ke pasar tersebut. Penyediaan dan penataan fasilitas pelayanan publik harus memperhatikan fungsi dan skala pelayanannya. Terdapat komponen yang paling berperan dalam peningkatan kondisi pasar yang berkenaan dengan konsep penataannya. Komponen tersebut dapat dipisahkan menjadi 2 kelompok komponen, komponen utama merupakan komponen yang membentuk dan memberikan fungsi pasar, sedangkan komponen pendukung merupakan komponen yang perlu disediakan untuk mendukung aktivitas di dalam pasar. Komponen tersebut antara lain :

1. Komponen utama, yang meliputi :
 - a. Bangunan
 - b. Kios Dagang
 - c. Gang Antar Kios
 - d. Jalan Utama
2. Komponen pendukung, yang meliputi :
 - a. Identitas (papan nama, gapura/tugu)

- b. Papan Informasi
- c. Toilet
- d. Mushola
- e. Air Bersih
- f. Drainase
- g. Parkir
- h. Pemadam Kebakaran
- i. Tempat Pembuangan Sampah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana retribusi pasar dan penyediaan fasilitas pedagang di Pasar Wage Tulungagung.

TUJUAN

Tujuan penelitian ini adalah mendiskripsikan retribusi pasar dan penyediaan fasilitas bagi pedagang di Pasar Wage Kabupaten Tulungagung. Selain itu tujuan pemungutan pajak adalah untuk meningkatkan pendapatan negara semaksimal mungkin serta untuk menunjang kebijaksanaan investasi, daya saing dan kemakmuran rakyat.

LANDASAN TEORI

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Fungsi Pajak

Pajak mempunyai dua macam fungsi, yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (Budgetair); Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.
2. Fungsi Mengatur (Reguleren); Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang social dan ekonomi, contoh: dikenekannya pajak yang tinggi bagi minuman keras, sehingga konsumsi minuman keras dapat ditekan.

Pembagian Jenis Pajak

Secara umum pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan dengan klasifikasi

a. Menurut Sifatnya

1. Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, contoh: pajak penghasilan.
2. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain, contoh: pajak pertambahan nilai.

b. Menurut Sasaran atau Obyeknya

1. Pajak subjektif; adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya. Dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak, contoh: pajak penghasilan
2. Pajak objektif; adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak, contoh: pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

c. Menurut Pemungutannya

1. Pajak pusat; adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, dipergunakan untuk membiayai rumah tangga negara, contoh: PPN, PPh, Bea Meterai dan

Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan sebagainya.

2. Pajak daerah; adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, dipergunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, contoh: pajak reklame, pajak hiburan dan lain-lain.

Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi:

1. *Official Assessment System* Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang. Ciri-ciri *official assessment sistem*:
 - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
 - b. Wajib pajak bersifat pasif.
 - c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus.
2. *Self Assessment Sistem* Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan,

membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. *Withholding Sistem*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. (Prabowo, 2009)

Proses desentralisasi tersebut didukung dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Otonomi daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah yang lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri. Salah satu tolak ukur untuk melihat kesiapan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah dengan mengukur seberapa besar kemampuan keuangan suatu daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Sumber keuangan tersebut salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari beberapa hasil penerimaan daerah yaitu pajak daerah,

retribusi daerah dan perusahaan daerah termasuk didalamnya pendapatan lain diluar pajak daerah dan retribusi daerah.

Retribusi Daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah sebagai akibat adanya kontra prestasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah atau pembayaran tersebut didasarkan atas prestasi atau pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah yang langsung dinikmati secara perseorangan oleh warga masyarakat dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan yang berlaku.

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 33 tahun 2004, sumber-sumber Pendapatan Daerah bersumber dari :

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1. Pajak Daerah

Pajak merupakan pungutan dari masyarakat oleh Negara / Pemerintah yang berdasarkan peraturan undang-undang yang sifatnya dipaksa dan bisa dikatakan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak ada kontra prestasi maupun balas jasa secara langsung. Dari pembayaran masyarakat tersebut hasilnya akan digunakan untuk membiayai

pengeluaran Negara dalam
Pembangunan maupun
penyelenggaraan pemerintahan.

2. Retribusi Daerah

Pengertian Retribusi secara umum adalah pembayaran kepada Negara yang dilakukan oleh masyarakat yang menggunakan jasa dari Negara Contoh : Kios di pasar. Retribusi merupakan iuran rakyat kepada kas Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yaitu :

- a. Bagian Laba
- b. Deviden
- c. Penjualan saham milik daerah

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

- a. Angsuran/cicilan penjualan
- b. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan
- c. Denda Pajak
- d. Denda Retribusi
- e. Pendapatan Bunga

METODE

Miniriset ini dilaksanakan pada Rabu, 7 April 2021 yang bertempat di Pasar Wage Kabupaten Tulungagung , Jalan Wage Rudolf Supratman Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung

Penelitian ini di desain untuk melihat menggambarkan, dan

menganalisis, mencatat dan menginterpretasikan kondisi lapangan khususnya dalam Evaluasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar Tradisional di Kecamatan Tondano Barat, dimana yang menjadi fokus dilihat dari 6 dimensi .

Kebijakan dari William, N. Dunn dalam (Datumola et al., 2020) yaitu:

1. Efektivitas ; apakah hasil retribusi pasar yang ditargetkan dapat dicapai?
2. Efisiensi;seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil retribusi pasar yang diinginkan?
3. Kecukupan;seberapa jauh pencapaian hasil retribusi pasar yang diinginkan dapat memecahkan masalah?
4. Perataan ; apakah biaya manfaat retribusi pasar didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?
5. Responsivitas ; apakah kebijakan retribusi pasar memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu?
6. Ketepatan;apakah hasil (tujuan) retribusi pasar yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif, untuk menggambarkan tentang retribusi pasar

dan fasilitas pedagang yang ada di Pasar Wage Tulungagung. Metode pengumpulan data yang digunakan terdiri dari metode : observasi, wawancara dan dokumen. Analisis data yang digunakan adalah reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian kami ini berada di Jalan Wage Rudolf Supratman Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung tepatnya bernama Pasar Wage. Penelitian tentang potensi Retribusi Pasar Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tulungagung.

Sumber Data

Sumber Data yang kami gunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Sumber Data Primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang meliputi keterangan atau data yang diberikan oleh beberapa penyewa kios di pasar Wage yang beralamat Jalan Wage Rudolf Supratman Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung.
2. Sumber Data Sekunder adalah sumber data yang secara langsung mendukung

sumber data primer yang mencakup dari mendeley dan hasil-hasil penelitian yang serupa dengan penelitian ini.

Proses Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang dimaksudkan adalah sebagai cara untuk memperoleh data dalam penelitian yang mengandung dan berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan datanya adalah sebagai berikut :

1. Survey, melakukan survey lokasi Pasar Wage Tulungagung
2. Wawancara langsung/interview Interview, yaitu mengadakan wawancara dalam hal ini tanya jawab dengan Wajib Pajak yang ditujukan untuk mengadakan penelitian terhadap tata cara pelaporan yang menyangkut masalah tersebut.
3. Study Dokumenter, cara pengumpulan data dengan menggunakan arsip dan dokumen- dokumen laporan keuangan dari Wajib Pajak Orang Pribadi yang bersangkutan.
4. Study dokumen melalui mendeley (S, 2020)

Analisis Data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Metode analisis data

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan cara penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Pajak Penghasilan

Penghasilan yang telah diperoleh oleh setiap wajib pajak yang memiliki NPWP (nomor pokok wajib pajak) wajib dikenakan pajak yaitu pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan pada subjek pajak atas penghasilan yang diperolehnya pada tahun pajak, dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak bila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir tahun pajak. Pengertian pajak secara umum adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang atau yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak dikenakan atas penghasilan kena pajak

perusahaan. Undang-undang pajak penghasilan mengatur mengenai subjek pajak, objek pajak, serta cara menghitung dan cara melunasi pajak yang terutang. Undang-undang pajak penghasilan menganut asas materiil artinya penentuan mengenai pajak yang terutang tidak tergantung kepada surat ketetapan pajak. (Dwika et al., 2020)

Retribusi Pasar

Pengertian Retribusi Pasar

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); tentang pengurusan pasar. (Tulungagung, 2020)

Pasar adalah fasilitas yang disediakan pemerintah daerah sebagai tempat kegiatan jual beli dan bongkar muat komoditi atau barang dagang. (Handayani, 2017)

Retribusi pasar merupakan salah satu Retribusi Daerah yang termasuk dalam jenis Retribusi Jasa Umum. Karena itu dalam retribusi pasar, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pasar didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak

sebagai pengganti biaya pengelolaan, biaya penyelenggaraan, biaya kebersihan dan biaya administrasi (Patmawati, n.d.)

Implementasi Kebijakan Retribusi

Pasar Wage Tulungagung

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, dimanapelaksana kebijakan melaksanakan serangkaian aktivitas atau kegiatan sehingga pada akhirnya akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dari kebijakan tersebut. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan tentunya tidak terlepas dari proses-proses atau tahapan-tahapan dari kebijakan itu sendiri (Dwika et al., 2020)

Retribusi Pasar Wage merupakan jumlah keseluruhan dari pemasukan retribusi yang didapat dari penarikan pajak wajib yang dibayarkan oleh penyewa kios di pasar Wage. Jumlah retribusi yang digunakan miniriset ini dilaporkan setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Dibawah ini adalah sampel data retribusi di Pasar Wage Tulungagung 2021 yang disajikan dalam tabel sebagai berikut :

No	Bayar Retribusi		Keterangan
	Tidak	Ya	
1.		✓	Dibawah Rp 100.000

2.		✓	Dibawah Rp 50.000
3.		✓	Dibawah Rp 50.000
4.		✓	Dibawah Rp 150.000
5.		✓	Dibawah Rp 100.000
6.		✓	Dibawah Rp 200.000
7.		✓	Dibawah Rp 50.000
8.		✓	Dibawah Rp 50.000
9.		✓	Dibawah Rp 100.000
10		✓	Dibawah Rp 100.000
11		✓	Dibawah Rp 50.000
12		✓	Dibawah Rp 150.000
13		✓	Dibawah Rp 150.000
14		✓	Dibawah Rp 100.000
15		✓	Dibawah Rp 50.000
16		✓	Dibawah Rp 50.000
17		✓	Dibawah Rp 100.000

18		✓	Dibawah Rp 100.000
----	--	---	-----------------------

Dari 18 Sampel yang kami survey menghasilkan data dimana data yang dihasilkan sebagai berikut :

1. Terdapat 7 kios yang membayar Retribusi dibawah Rp 50.000
2. Terdapat 7 kios yang membayar Retribusi dibawah Rp 100.000
3. Terdapat 3 kios yang membayar Retribusi dibawah Rp 150.000
4. Terdapat 1 kios yang membayar Retribusi dibawah Rp 200.000

Dari Sampel tersebut mengatakan bahwa kios penyewa di Pasar Wage Tulungagung telah membayar Retribusi Pasar secara rutin. Dari data tersebut nominal retribusi yang dibebankan setiap pedagang di Pasar Wage Tulungagung cenderung tidak sama.

Setelah kami melakukan wawancara dari beberapa sampel ada faktor yang menjadi pemicu dalam perbedaan besar atau kecil retribusi yang dibayarkan adalah sebagai berikut :

- a. Luas atau kecilnya bangunan yang ditempati oleh pedagang, semakin luas tempat yang dipergunakan akan semakin besar nominal yang dibebankan kepada pedagang dan jika luas bangunan yang digunakan itu kecil

maka retribusi yang dibebankan akan lebih kecil

- b. Akses untuk menuju ke kios tersebut, jika bisa dilalui kendaraan maka kios tersebut akan dikenai retribusi yang dibebankan akan semakin besar, sedangkan akses untuk menuju kios tersebut tidak bisa dilalui oleh kendaraan maka retribusi yang dibebankan akan lebih kecil.

SARAN DAN KESIMPULAN

Retribusi pasar merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang tertuang kedalam APBD Daerah. Pasar sendiri sudah bisa dikatakan sebagai kebutuhan pokok bagi masyarakat.

Jika mengacu pada peraturan perpajakan memang setiap kios di Pasar Wage harus melaksanakan kewajiban perpajakan, namun banyak dari mereka yang tidak memahami mengenai sistem perpajakan di Negara kita sehingga tidak melakukan kewajiban perpajakannya. Jika mereka tahu banyak dari mereka yang berpura pura tidak tahu harus membayar pajak. Secara teori dirijen pajak lah yang bertindak tegas untuk melakukan penyuluhan dan memberi tindakan tegas berupa sanksi bagi yang tetap tidak melakukan kewajibannya.

Namun untuk melakukan tindakan tentunya akan membutuhkan waktu yang lama dan sumberdaya manusia yang tidak sedikit dari dirjen pajak. Sementara potensi penerimaan dari para kios tersebut sangat kecil sehingga akan lebih efektif apabila dirjen pajak menyerahkan sumberdayanya untuk mengejar para wajib pajak besar yang memiliki potensi penerimaan yang lebih tinggi.

Besarnya biaya sewa kios tergantung besar kecilnya kios yang ditempati, sedangkan untuk biaya pajak retribusinya dilakukan setiap hari dengan sistem pembayarannya ditarik setiap harinya perkiraan Rp.1000-5000 per kios.

Dari bab sebelumnya kami memberikan saran yaitu :

- a. Meningkatkan kinerja dan pengawasan terhadap petugas pengelola atau pemungut retribusi di lapangan dengan memperbaiki sistem kerja bagi petugas pemungut/pengelola.
- b. Memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya membayar retribusi pelayanan pasar.
- c. Sosialisasi peraturan dan perundang – undangan yang berlaku yang mengatur tentang retribusi pelayanan pasar, guna meningkatkan kesadaran wajib

pajak untuk membayar kewajibannya, sekaligus sanksi tegas terhadap pelanggar peraturan tersebut.

- d. Terdapat beberapa pos-pos retribusi yang perlu ditingkatkan kembali dan perubahan pos – pos yang perlu di anggarkan kembali sehingga dapat dikelola lebih optimal.
- e. Analisis potensi diperlukan untuk mengetahui peluang yang potensial di daerah agar lebih meningkatkan pendapatan asli daerah dan lebih mensejahterakan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyani, L. P. G., & Noviani, N. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 1885.
<https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p08>
- Datumola, A. A., Dengo, S., & Kolondam, H. F. (2020). Evaluasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar Tradisional Di Kabupaten Minahasa (Studi Di Pasar Tradisional Tondano Barat). *Jurnal Administrasi Publik*, 6(88), 70–77.

Dwimawanti, I. H. (2020).

Implementasi Kebijakan Retribusi
Pelayanan Pasar di Pasar Adiwerna
Kabupaten Tegal. *Journal of
Education, Humaniora and Social
Sciences (JEHSS)*, 2(3), 561–572.
<https://doi.org/10.34007/jehss.v2i3.112>

2

Handayani, S. (2017). Potensi Retribusi
Pasar Terhadap Peningkatan
Pendapatan Asli Daerah (Pad)
Kabupaten Lamongan. *Jurnal
Akuntansi*, 2(1), 24.
<https://doi.org/10.30736/jpensi.v2i1.96>

Hartati, N. (2019). Penerapan Tarif Pajak
Penghasilan Badan Sebelum Dan
Sesudah Perubahan Undang-Undang
Pajak Penghasilan. *Jurnal Ilmu
Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 1(1),
24–28.

Naleng, A., Manossoh, H., & Tangkuman,
S. (2017a). Analisi Potensi dan
Efektivitas Pemungutan Retribusi
Pasar di Kabupaten Kepulauan Siau

Tagulandang Biaro. *Jurnal EMBA*,
5(2), 2240–2249.

Naleng, A., Manossoh, H., & Tangkuman,
S. (2017b). *Analisi Potensi dan
Efektivitas Pemungutan Retribusi
Pasar di Kabupaten Kepulauan Siau
Tagulandang Biaro*. Jurnal EMBA.

Patmawati, 1996:64. (n.d.). *Retribusi
pasar, jenis retribusi jasa umum*.

Permana. (n.d.). *Pendapatan Asli Daerah*.

Prabowo, R. G. M. (2009). *Dasar-dasar
perpajakan*.

S, D. D. (2020). *PENERAPAN NORMA
PERHITUNGAN PAJAK NETTO
BAGI WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI PADA WILAYAH KERJA
KANTOR PAJAK PRATAMA PASAR
MINGGU*. 1(1), 52–63.

Tulungagung, P. (2020). *PERATURAN
DAERAH KABUPATEN
TULUNGAGUNG NOMOR 1
TAHUN 2020*. In *Orphanet Journal
of Rare Diseases* (Vol. 21, Issue 1,
pp. 1–9).